

OMBUDSMAN TEMUKAN MASIH ADA GURU YANG JUAL BUKU DAN LKS

Kamis, 27 Juni 2019 - Dian Megawati Tukuboya

KORIDORZONE.COM, TERNATE-Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara menemukan, selama periode Mei-Juni 2019 guru-guru SD dan SMP di Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan masih menjual buku teks mata pelajaran kepada siswa.

Alasannya, siswa tak diizinkan membawa pulang buku mata pelajaran karena rasio jumlah buku dan siswa tidak sebanding. Alasannya lainnya, buku teks yang dibawa pulang siswa sering hilang dan rusak. Masalah ini mencuat saat seminasi yang melibatkan kepala-kepala sekolah SD dan SMP Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan di Meeting Room Hotel Batik Ternate, Rabu, 26 Juni 2019.

Seminasi dengan thema Efektivitas Pengadaan Buku Teks Utama melalui Dana Bantuan operasional Sekolah BOS pada satuan pendidikan dasar di kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan itu menghadirkan pembicara Ketua Dewan Pendidikan Kota Ternate Asgar Saleh.

Asisten Ombudsman Muhammad Iradat sekaligus penanggung jawab kegiatan seminasi hasil mengungkapkan, tujuan dari 20% Dana BOS digunakan untuk pembelian buku agar tidak membebani siswa maupun orang tua untuk membeli buku.

Mengutip Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana BOS, 20% alokasi Dana BOS untuk pembelian buku adalah salah satu wujud pendidikan bebas biaya satuan pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun.

Selain itu, Ombudsman juga menemukan masih ada praktek penjualan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) di beberapa sekolah yang bersifat wajib. "Sampai ada temuan wawancara dengan beberapa siswa, tidak memiliki LKS, maka sanksinya tidak diikutsertakan proses belajar mengajar oleh guru tertentu," kata Muhammad.

Menanggapi hal ini, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Maluku Utara Sofyan Ali mengatakan, seharusnya tidak ada penjualan Lembar Kerja Siswa, karena kewajiban guru menyusun LKS bukan membebani ke siswa membeli LKS.

Menurutnya, tujuan diskusi ini untuk menilai seberapa efektif pengadaan buku teks utama melalui 20% anggaran dana BOS. "Nanti hasil diskusi ini akan dideseminasikan sebagai bahan evaluasi, baik Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Sekolah SD dan SMP di Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan provinsi Maluku Utara." (naco)

Â